

“E-Government” di Indonesia: Menuju Visi X “Masyarakat Telematika Berbasis Pengetahuan” Tahun 2020

Teguh Ratmanto

ABSTRACT

After the The Reformation Era had forced New Order steep down, the Government began a new era and introducing concept of “Clean Government” which is implemented in E-government. The Internet had helped the government to open himself for publik by online service. The Government had released declaration (Keppres No. 61/2001) which encouraged the use of Information and Communiation Technology, concerning political and legal base for the development of e-government. According to the Keppres Number 6/2001 the government had introduced TKTI (Tim Koordinasi Telematika Indonesia) which has to develop National Information Technology Framework (NITF) with a vision to establish Telematic society based on knowlede in 2020. The problems are the low of internet acces and cultural obstacles. The government, actualy , is on the right track, however they are still in the third category (Minimal E-government capacity) where almost all of sites contain only information.

Kata kunci: “e-government,” masyarakat informasi, telematika

Setelah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 yang gagal pemerintahan orde lama di bawah Sukarno digantikan oleh pemerintahan orde baru di bawah Soeharto. Pergantian rezim ini juga menandai pergantian iklim ideologis. Seiring naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan, pemerintah menutup 43 surat kabar (pro sukarno) dari 163 yang ada pada saat itu. Di sisi yang lain Orde Baru mendukung Koran yang menentang komunisme seperti, KAMI dan ABADI (Hill, 1990).

Suasana ideologis juga menandai wacana perundangan-undangan, seperti terlihat pada pemilihan kata-kata dan istilah terminologis. Pada Undang-undang no. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers kita dapat menemukan istilah-istilah seperti seperti *pers yg revolusioner*, *pers pengawal revolusi* dan, *pers*

sosialis pancasila yang pada Undang-Undang pokok pers tahun 1982 diubah menjadi *pers yang mendukung perjuangan nasional*, *pers pengawal pancasila*, dan *pers pancasila* (Hanazaki, 1998)

Pada Undang-undang pokok pers tahun 1966 pada pasal peralihannya menyebutkan bahwa penerbit surat kabar wajib memperoleh baik Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan maupun Surat Izin Cetak (SIC) dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (kopkamtib), tanpa satupun dari kedua surat izin tersebut, surat kabar dianggap tidak sah dan konsekuensinya dapat ditutup oleh pemerintah. SIC dicabut pada tahun 1977, tetapi SIT tetap diperlukan hingga diterbitkannya Undang-undang Pokok Pers tahun 1982. Undang-undang no. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ini memakan

Tabel: Pergeseran Terminologis dalam UU Pokok Pers 1966 dan UU Pokok Pers 1982

UU Pokok Pers 1966		UU Pokok Pers 1982
Revolusi	Menjadi	Perjuangan Nasional
Mengaktifkan Massa	Menjadi	Mengaktifkan pembangunan nasional
Pengawal Revolusi	Menjadi	Pengawal Pancasila
Pers Sosialis Pancasila	Menjadi	Pers Pancasila
Revolusi Pancasila	Menjadi	Ideologi Pancasila

Sumber : *Pers Terjebak*, (Hanazaki, 1998)

korban setelah peristiwa Malari tahun 1974 dimana pada saat itu 12 terbitan ditutup oleh pemerintah, dan pada tahun 1978 tujuh penerbitan ditutup karena liputannya mendukung aksi demonstrasi mahasiswa yang menentang orde baru (Hill, 1994).

Aturan peralihan ini berlaku selama 15 tahun, ketika pada tahun 1982 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dicabut dan diganti dengan Undang-undang pokok pers tahun 1982 (yang pada hahikatnya sama saja tidak memberikan kebebasan pers). Pers masih dihantui oleh ancaman bredel (*banning*) yang mengganti SIT dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang menjadi kontroversial adalah peraturan pelaksanaannya (*operating regulation*) yang berupa peraturan Menteri Penerangan No 01 Tahun 1984 yang memberikan wewenang kepada Menpen untuk mencabut SIUPP tersebut tanpa adanya proses negosiasi atau melalui proses pengadilan. (Sirait, 1999)

Pers pada masa Orde Baru tidak memiliki kebebasan karena mereka dapat ditutup dengan mudah oleh pemerintah melalui menteri penerangan (Sirait, 1999) (Hanazaki, 1998) dan (Hill, 1994). Di Indonesia pada Era Soeharto, pers telah dimandulkan dari fungsi kontrol tersebut sehingga pers tidak leboh dari corong penguasa, pers yang bersuara kritis dan vokal terhadap pemerintah dibredel.

Tidak adanya kontrol, sebetulnya dihilangkannya kontrol oleh pemerintahan Soeharto menjadikan tidak adanya oposisi dan

kritik atas jalannya roda pemerintahan. Media massa yang kritis thd pemerintah dibredel, seperti menimpa harian, *Nusantara*, *Harian KAMI*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, *Mingguan Wenang*, *Pemuda Indonesia*, *Ekspress Weekly Newsmagazine*, *Pedoman* (Jakarta) *Suluh Berita* (Surabaya) *Mahasiswa Indonesia* (Bandung), dan *Indonesia Pos* (Ujung Pandang) terjadi tahun 1995 setelah demonstrai besar-besaran hampir di semua kota besar Indonesia pada tahun 1974. Pada 1978, pemerintah juga menutup 7 surat kabar Jakarta dan melarang terbit 7 penerbitan kampus (Hill, 1994). Tahun 1994 pemerintah menutup tiga surat dan setelah peristiwa Malari, kemudian terjadi lagi, pada tahun 1994 yang menimpa tiga penerbitan, terkemuka yaitu *Tempo* dan *Editor* (*magazine*) dan *DeTIK* (Tabloid). (Sirait, 1999)

Pada satu sisi sifat otoritarian yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru ini membawa dampak pada stabilitas sosial dan politik. Hal ini menjadikan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

“Before mid of 1997, Indonesia experienced vast growth in many economic sectors such as high economic growth and vast development in the goods and services, financial and labor market. ... Between 1989 and 1996, Indonesia recorded high economic of average around 7%. The high economic growth was accompanied by structural changes in the economy from agricultural based economy toward industrial and manufacturing based economy.” (Nasution, 2000) However, on the other side, “... the impressive economic development under the New Order has been under the

control of a small number of business organizations dependent on the direct patronage of the President and his extended family.” (Sherlock, 1998).

Kondisi ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat semu karena tidak dilandasi oleh kemampuan wirausaha tetapi lebih karena kedekatannya dengan penguasa. Hal ini memunculkan, apa yang disebut oleh Yoshihara Kunio (1990), sebagai kapitalisme semu (*Ersatz Capitalism.*) Meskipun tidak memiliki data resmi *one of Indonesian Leading economists*, Prof Dr. Sumitro Djojohadikusumo menyebutkan bahwa tingkat kebocoran anggaran selama Orde Baru adalah sekitar 30% (Baswir, 1999). Menariknya, dia adalah besan Soeharto.

Otoritarianisme yang dijalankan oleh rezim Soeharto dan pembungkaman terhadap pers yang secara pragmatis telah menghasilkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, sehingga ekonomi tumbuh dengan baik meskipun dengan biaya sosial yg mahal. Karena struktur perekonomian Indonesia yang hanya dikendalikan oleh sekeompok elit pengusaha dan penguasa, maka kemajuan ekonomi yang tercipta ternyata tidak memiliki landasan yg kuat.

Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia ini terlihat dengan jelas ketika Indonesia dapat dengan mudah diserang oleh krisis finansial yang melanda Asia, dan di samping itu, lambatnya pemulihan ekonomi dibandingkan dengan Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia telah menunjukkan bahwa kondisi Indonesia telah sangat parah, dimana kerusakan ini disebabkan oleh rezim Orde Baru yang telah memerintah selama lebih dari tiga puluh tahun, tanpa kritik oposisi dan kontrol masyarakat. Rezim Soeharto dengan pembenaran ideologi pembangunannya menjadikan kritik dan kontrol terhadap pemerintah dari masyarakat, khususnya pers, sesuatu yang terlarang.

Menarik untuk dicermati, negara tetangga Indonesia, Singapura, yang pada masa hampir bersamaan juga dipimpin oleh seorang pemimpin yang otoriter, Lee Kuan Yew, melakukan pengekangan terhadap pers. Kondisi pengekangan terhadap kebebasan pers ini sama terus berlangsung dari sejak masa Lee Kuan Yew hingga

anakny Lee Hsien Long naik ke tampuk kekuasaan beberapa waktu lalu. “*Most major media outlets are linked to the government and journalists face subtle pressure from the ruling party. Journalists often avoid reporting on sensitive topics, including alleged government corruption or nepotism or on the supposed compliance of the judiciary.*” (Report on the freedom in the world, Singapore, 2003).

Ada 14 surat kabar yang beredar di Singapura, 12 dimiliki oleh SPH (Singapore Press Holding) dan dua terbitan, yaitu *Thumbs* yang ditujukan pada anak-anak SD dan *The Friday Weekly* yang memiliki pangsa pasar *Secondary School students*. SPH dikendalikan oleh Temasek Holding yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah di mana para eksekutifnya berada di lingkaran dalam kekuasaan. (Ling and Yee, 2005) Ketika membandingkan antara Indonesia dengan Singapore, Hanazaki (1998:65) menyebutkan, pengalaman itu menggambarkan, jangkauan pengekangan terhadap pers lebih tergantung pada kecenderungan kesewenangan untuk melindungi kepentingan kepemimpinan nasional daripada untuk mendorong kemajuan pembangunan. Singapura, yang mempunyai GNP perkapita 10.450 dollar AS (1989), sampai sekarang masih terus menempatkan ‘tugas dan tanggung jawab pembangunan’ di atas kebebasan pers.

Pengekangan kebebasan pers di Singapura ditujukan untuk menjaga stabilitas agar pemerintah dapat menciptakan kondisi dan landasan perekonomian yang lebih kokoh, sehingga biaya sosial untuk pengekangan pers ini diimbangi dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Berbeda dengan Singapura, Indonesia memilih jalan yang lain, pengekangan kebebasan pers lebih ditujukan untuk mempertahankan rezim yg didominasi segelintir elit dan kemajuan ekonomi yang muncul bersifat semu.

Kontrol pemerintah atas kebebasan pers dilakukan melalui SIUPP yang setiap saat dapat dicabut oleh Menteri Penerangan dan kontrol atas para jurnalis melalui wadah resmi PWI. PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawanan yang

diakui oleh pemerintah mengontrol dengan ketat aktivitas para jurnalis yang dinilai berseberangan dengan pemerintah dan merekomendasikan pemecatan kepada para redaktur yang memecahkan mereka (Abit dkk, 1998), Sirait (1999). Kondisi ini menyebabkan para wartawan yang tersingkir dari PWI mendirikan organisasi tandingan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), segera setelah peristiwa pembredelan *Tempo*, *DeTIK*, dan *Editor* dan mereka menerbitkan pers alternatif seperti *Independen* yang diterbitkan secara sembunyi-sembunyi pada tahun 1994 (Sirait, 1999). Pers alternatif ini bersama dengan internet memainkan peranan penting di dalam menyebarkan informasi yang tidak mungkin disebarkan melalui jaringan pers biasa. Pengalaman atas pembredelan *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*, menjadikan pers selalu dihantui kekhawatiran mengalami pembredelan. Hal ini menjadikan media masa memilih untuk menulis dengan bahasa yang berputar-putaran tersamar. (Naomi, 1996)

Di sisi lain, sejak paruh kedua dekade 1990-an, internet mulai merebak di Indonesia melalui warnet (*internet café*). Internet menyediakan ruang public yang bebas dari control pemerintah. *According to Lim (2002), "During the the 1996-1996 period, just before and during the peak of the crisis, cyberspace became the principal means by which people could discuss and criticize the New Order. Through internet people could gain and share information that had previously been controlled by the state and its infamous Ministry of Information"*

Setelah gerakan Reformasi berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru, maka pemerintah mulai mengalami reformasi. Salah satu bentuk reformasi pemerintah ini adalah dengan diperkenalkannya *e-government* sebagai suatu bentuk pemerintahan yang bersih. Dengan bantuan internet pemerintah telah membuka dirinya bagi akses public melalui layanan *on-line*.

E-Government di Indonesia

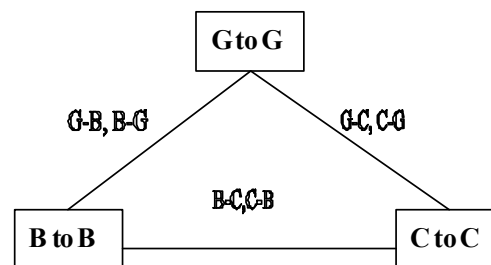
Salah satu mandat dari gerakan reformasi adalah layanan publik. Di samping untuk mengimplementasikan pemerintahan yang baik,

efektif dan efisien, pemerintah telah berniat untuk menerapkan strategi baru di dalam memberikan layanan publik. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah telah mulai menggunakan internet di dalam administrasi publiknya untuk memberikan layanan yang cepat, efektif, efisien dan transparan bagi semua publiknya. Di samping itu, *e-government* dianggap sebagai manifestasi dari pemerintahan yang bersih berbasis elektronik.

Sebagai landasan politis dan yuridis bagi pengembangan *e-government*, pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2001 sebagai pedoman bagi pemanfaatan dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dalam sistem administrasi pemerintahan yang kemudian di susul dengan keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan sebuah kerangka kerja bagi *e-government*. Melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2001 pemerintah telah menugaskan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) untuk mengembangkan National Information Technology Framework (NITF) dengan visi untuk mewujudkan masyarakat telematika berbasis pengetahuan pada tahun 2020 (Kristiadi, 2001).

Rencana *e-government* di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Konsep "E-Government" di Indonesia



Sumber: *Goechi.com (2001)*

Pemerintah Indonesia mengembangkan hubungan segitiga antara sektor-sektor yang terlibat di dalam rancangan *e-government*. Ketiga sektor ini adalah pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat. Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, sedangkan kalangan bisnis terdiri dari

pengusaha, kecil, mikro, dan menengah, dan pengusaha besar. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah menjadi fokus pemerintah untuk diberdayakan, karena mereka memiliki banyak keterbatasan, baik dalam bidang finansial maupun manajerial, yang harus dibantu oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan informasi dan peluang bagi pengusaha kelompok ini dalam mempersiapkan mereka memasuki persaingan global. Dari sudut pandang pemerintah, menurut Haryono dan Widiwardono (2004), “*E-government is needed for the following reasons: 1) to support the government change toward a democratic governance practice; 2) to support the application of authority balances between central and local government; 3) to facilitate communication between central and local governments; 4) to gain openness; and 5) transformation towards information society era.*”

Menurut Schware (2002) strategi pemerintah Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi komunikasi dan informasi di dalam memberikan layanan publik disusun dalam lima tahap. Tahap-tahap ini direncanakan akan terwujud pada tahun 2020.

Sekarang Indonesia berada pada tahap ketiga. Menurut seksi HRD Asia-Pacific Telecommunity (2003) proyek-proyek percontohan *Government On-line* sejak Mei 2002 telah dilaksanakan di Kediri dan Sidoarjo Jawa Timur, Pandeglang dan Lebak Jawa Barat, dan Makasar Sulawesi Selatan. Tujuan utama dari proyek-proyek percontohan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas, dan untuk mendorong pengusaha kecil mikro dan menengah agar dapat lebih berkembang. Layanan-layanan canggih itu dapat diakses dengan menggunakan kartu serba

Tabel 1 : Rencana “E-Government” Pemerintah Indonesia

Phase 1 : Preparation Education, Awareness Building, Rationalize GOL for Government of Indonesia, e-Legislation (Cyber Laws)	Near Term
?	
Phase 2 : Presence (2002) Readiness Assessments/Diagnostics, Taskforces, Stakeholders Supports (Top Down), GOL National Action Plan, Website development	Medium Term
?	
Phase 3: Action GOL Pilot projects and service offerings selection, ICT Infra structure development, Define standards, GOL processes, Change Management, E-Leadership, GOL Budget Allocations and Management	Long Term
?	
Phase 4 : Participation Government to Business and Government to Community interaction, Government to Government partnerships, Business Transactions, Change relationships (G2C, G2B, G2G, G2E), Coordination of Government Activities	Long Term
?	
Phase 5 : Transformation Applying GOL Best Practices, Performance Measurement /Accountability, New GOL Processes and Services Offerings, GOL Policy Review	

Sumber : Diadaptasi dari Rob Schware (2002)

Catatan : Rob Schware menulis artikelnya pada tahun 2002

bisa dan dapat berfungsi sebagai kartu identitas juga. Lebih jauh lagi, Susatijo (2003) menyebutkan bahwa pemerintah juga mengembangkan aplikasi-aplikasi *e-government* lain seperti:

- (1) *E-learning*: yang diimplementasikan di Sidoarjo dan beberapa kampus di Jawa Timur.
- (2) *E-Business*: yang diimplementasikan di Sidoarjo.
- (3) *E-Health*: Sistem Informasi medis yang bersifat mobile dan Hospital Contact Center.
- (4) *E-Democracy*

Proyek-proyek percontohan ini telah diujicoba dalam rangka mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang ideal sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada pada pemerintah, baik secara teknologi maupun *financial*, sekarang ini. Selain proyek-proyek percontohan ini, hampir semua kantor pemerintah telah memiliki website, meskipun dengan fasilitas dan kemampuan yang berbeda-beda, meskipun demikian, website-website ini hanya menawarkan informasi dan *down load* data. Hal ini terjadi karena ketiadaan standar nasional layanan *government on-line* (GOL). Sebagian besar layanan *on-line* yang tidak terstandarisasi ini disebabkan karena kurangnya dana dan sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari banyaknya *website* pemerintah yang tidak di *up date* selama berbulan-bulan.

Permasalahan:

1. Akses Internet

Di samping prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan proyek *e-government* di Indonesia.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia masih sangat rendah hanya sekitar 5 % dari seluruh penduduk. Menurut sebuah survey yang dilakukan oleh UNPAN, sebuah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa, dari semua negara-negara yang menjadi anggota PBB yang disurvei, Indonesia berada pada kategori tiga dari empat kategori (Global E-government Index, 2003). Keempat kategori yang

Tabel 2. Pelanggan dan Pengguna Internet dari 1998 hingga 2004

Tahun	Pelanggan	Pengguna
1998	134,000	512,000
1999	256,000	1,000,000
2000	400,000	1,900,000
2001	581,000	4,200,000
2002	667,002	4,500,000
2003	865,706	8,080,534
2004*	1,300,000	12,000,000

Sumber: Statistik APJ II Maret 2003

*ramalan hingga akhir 2004

dimaksudkan adalah *high e-government capacity*, *medium e-government capacity*, *minimal e-government capacity*, dan *deficient e-government capacity*.

Menurut Djoko Agung, *assistant deputy* untuk urusan pengembangan *e-government*, "As of last March 2003, some 369 government offices had opened their own websites. However, about, 24 percent of the websites failed to maintain their running times due to the limited budget. Today, only 85 are still operating with complete option." Di samping itu, "Today, only 20 % of government employees have e-mail access." (*The Jakarta Post Online*, 15 January 2003). Tak dapat dibayangkan, bagaimana pegawai negeri dapat melayani publik melalui sistem *on-line* bila mereka sendiri tidak memiliki akses ke internet juga. Tingkat akses yang rendah terhadap internet, baik publik maupun pegawai negerinya, telah menjadikan perkembangan *e-government* yang sangat rendah. Untuk mengatasi masalah rendahnya akses terhadap internet, pemerintah telah menggalakkan program penggunaan internet. Program ini merujuk pada hasil pertemuan World Summit on the Information Society (WSIS) di Jenewa pada Desember 2003, dimana salah satu rekomendasinya adalah agar setiap negara membuat action plan agar pada tahun 2015, paling tidak 50 % penduduknya telah memiliki akses terhadap internet. Untuk men capai target ini

pemerintah telah meluncurkan tiga strategi,, yaitu:

- (1) Menambah jumlah Warung Internet yang dapat diakses dengan mudah dengan harga yang terjangkau
- (2) Menggalakkan program satu sekolah satu laboratorium
- (3) Mengembangkan MCC (*Multi Purpose Community Access Center*)

Di dalam upaya untuk mewujudkan program-program ini, pemerintah telah mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta di dalam menyediakan komputer murah untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia (seharga sekitar US\$ 180 per komputer) dan *Microsoft* telah setuju untuk menyediakan software murah seharga hanya US\$ 2.5 untuk keperluan tersebut. Harga itu merupakan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga normal, dimana harga normal untuk *software Microsoft* adalah sekitar US\$ 200 per *software* (*The Institute for e-government*, 2004). Sebagai sebuah Negara berkembang, Indonesia memiliki masalah finansial dan sumber daya manusia di dalam pengembangan program-program *e-government*. Oleh karena itu, sehubungan dengan masalah-masalah ini, O'Looney (2002, p.5) benar ketika ia mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara adalah:

- (1) Kapasitas pelayanan
- (2) Masalah hukum dan infrastruktur bagi transaksi *on-line*
- (3) Infrastruktur jaringan
- (4) Akses untuk publik dan pegawai pemerintah
- (5) Arsitektur jaringan
- (6) Hak intelektual dan privasi
- (7) Konektivitas dan manajemen informasi/ pengetahuan

2. Perubahan Kultural

Secara kultural, masyarakat Indonesia masih bercirikan masyarakat tradisional yang ditandai dengan adanya hubungan patron-klien dan budaya feodalistik. Di dalam sistem budaya yang seperti ini, pegawai pemerintah masih dianggap sebagai raja, akibatnya, pegawai pemerintah juga dianggap memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan publik atau masyarakat

karena mereka berada di dalam lingkaran "raja" atau pemerintah. Hal ini diperparah lagi oleh pemerintahan otoriter Soeharto selama lebih dari 32 tahun dimana budaya feodalisme ini dikembangkan dan dipertahankan melalui pendekatan militeristik. Di era Soeharto, pegawai pemerintah di sebut sebagai 'Abdi Negara' di mana istilah itu merupakan kebalikan dari "Abdi Masyarakat". Pada masa itu, KORPRI (Korps Pegawai Negeri Indonesia) menjadi mesin politik untuk mempertahankan rezim Orde Baru, dan akibatnya layanan publik terhadap masyarakat menjadi terabaikan.

Pada era reformasi dengan sistem administrasi pemerintahan yang lebih demokratis, pegawai negeri harusnya kembali ke tugas dasar mereka yaitu melayani publik. Sebagai sebuah negara berkembang dengan hampir lebih dari 60% penduduknya tinggal di pedesaan budaya yang dominanpun adalah budaya pedesaan dengan ciri kuatnya budaya oral. Pendekatan kultural terhadap masyarakat Indonesia yang masih hidup secara tradisional di pedesaan ini harus menjadi prioritas pemerintah di dalam menyediakan layanannya bagi publik.

Analisis

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah telah berada pada jalur yang tepat. Meskipun demikian, hasil-hasil yang telah dicapai belumlah cukup. Saat ini Indonesia masih berada pada kategori ketiga dalam e-government yaitu Minimal e-government capacity. Hampir semua situs-situs hanya berisikan informasi, sementara itu, layanan-layanan on-line hanya ditemukan pada situs-situs pemerintah yang berada dalam status proyek percontohan yang hanya bisa ditemukan pada beberapa situs dan pemerintahan lokal saja. Satu hal yang harus mendapat perhatian pemerintah adalah bahwa pemerintah harus juga memperhatikan bagaimana desain situsnya. Situs, yang berbeda, baik dengan televisi atau pun majalah, harus dirancang dengan mempertimbangkan penggunaannya. Desain yang terlalu sederhana tidak akan menarik perhatian, tetapi desain yang terlalu rumit juga akan membuat

sulit dan membingungkan, Penelitian yang dilakukan oleh Roach (2003) melaporkan bahwa, “*The results revealed that the average government Web site is written at the 11-th grade level, despite the fact that half of all Americans read at the eight-grade level or lower.*”

Menurut West (2000), “*There are four general stages of e-government development that distinguish where different government agencies are on the road to transformation: (1) the billboard stage; (2) the partial-service-delivery stage; (3) the portal stage, with fully executable and integrated service delivery; and (4) interactive democracy with public outreach and accountability enhancing features.*” Berdasarkan kategori West ini situs-situs pemerintah Indonesia masih berada pada kategori ‘*The Billboard Stage*’. Hal ini dapat dipahami karena investasi pada *e-government* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sangat terbatas, di samping itu pemerintah Indonesia pun masih berada dalam tahap belajar. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia harus terus belajar untuk terus mengembangkan kapasitas dan kemampuan layanan elektroniknya kepada publik. Kegagalan untuk menyelenggarakan layanan elektronik yang telah dijadwalkan ini akan menjadikan uang yang telah dibayarkan oleh para pembayar pajak menjadi sia-sia. Penelitian yang telah dilakukan oleh Charbaji dan Mikdashi (2003) menyimpulkan bahwa “*The Government should offer more services online that bring real benefits (in terms of costs saving, time and convenience) to the citizens. Access will connect the citizens to the government then what will they do? If there are no useful services, the initial enthusiasm will be gone.*”

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan akses internet sebanyak mungkin bagi masyarakat melalui penyebaran Warnet, program satu sekolah satu laboratorium, dan *Multi purpose Community access Center* (MCC) merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mewujudkan masyarakat telematika berbasis pengetahuan pada tahun 2020. Di dalam rangka mewujudkan visi itu ketersediaan akses internet merupakan satu keharusan yang

tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun demikian ketersediaan akses internet saja tidaklah cukup. *E-government* sebagai manifestasi dari pemerintahan yang bersih di era masyarakat informasi juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian kultural dan organisasional. Penyesuaian ini harus dilakukan baik oleh aparat pemerintah, maupun masyarakat. Pergeseran dari masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat informasi berbasis teknologi merupakan tugas besar masyarakat dan pemerintah. Hal ini bukan merupakan hal yang mudah, meskipun juga bukan satu hal yang tidak mungkin. Penyediaan akses internet harus diikuti dengan usaha-usaha untuk membangun kesadaran sosial untuk menggunakannya dengan tepat dan bijaksana. Tetapi sekarang ini, *e-government* di Indonesia masih berada pada kategori ‘*the billboard stage*’ dimana hampir sebagian besar situs pemerintah hanya memberikan jasa informasi dan download data saja. Bila seluruh layanan elektronik ini sudah tersedia, keterampilan untuk menggunakan dan memanfaatkan layanan ini secara maksimal juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena hal ini dapat menghemat waktu dan membantu masyarakat dalam mengakses layanan-layanan yang ditawarkan. Temuan riset yang dilakukan di Libanon yang dilakukan oleh Charbaji dan Mikdashi (2003) menunjukkan bahwa “*... the cognitive component ‘awareness’ is significantly and directly related to the conative dimension. In addition, the findings also show that although knowledge and awareness are directly and indirectly related to the behavioral intention, it appears that awareness has greater direct effect.*”

Sebagai sebuah negara yang baru belajar berdemokrasi, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam memanfaatkan internet di dalam melaksanakan administrasi publiknya merupakan sebuah harapan bagi terwujudnya sebuah pemerintahan yang bersih dan baik yang telah lama didambakan. Keseriusan pemerintah di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih ini akan membawa dampak pada meningkatnya dukungan rakyat terhadap pemerintah dan akan memunculkan lebih banyak partisipasi masyarakat di dalam

menata kehidupan bernegara dan terlibat di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang demokratis akan membawa dampak yang sangat besar pada kehidupan sosial di negara berkembang. Berdasarkan penelitannya pada daerah-daerah pedesaan di India, Prattipati, (2003) menyimpulkan bahwa:

The potential impact of e-Government on the citizens of the developing countries will be much higher than in the developed countries as the developing countries start at very low of good governance compared to developed countries. However, the developing countries face lot more resistance to change because of entrenched bureaucracies and vested interests in the current system. What is needed is a political will rather than money.

Kesimpulan

1. Aspek Teknis

E-government di Indonesia masih berada pada tahap awal. Layanan *on-line* yang diberikan oleh situs-situs pemerintah sebagian besar masih berupa akses informasi dan *download* saja. Layanan-layanan *on-line* lainnya seperti *e-transaction* masih sangat terbatas dan hanya tersedia pada beberapa pilot proyek percontohan di daerah-daerah tertentu. Keterbatasan jumlah komputer dan akses internet dibandingkan dengan populasi seluruh penduduk masih merupakan kendala klasik yang dihadapi negara-negara berkembang. Usaha-usaha pemerintah untuk mensosialisasikan penggunaan internet dengan menyediakan akses internet melalui Warnet, *Multi purpose Community access Center*, dan program *One School One computer Laboratory* (OSOL) yang didukung oleh sektor swasta masih terlalu dini untuk dievaluasi.

2. Aspek Sosio-Kultural

Pergeseran yang cepat dari masyarakat agrikultural tradisional ke masyarakat informasi yang kosmopolit merupakan proyek Kultural besar yang bukan merupakan hal yang tidak mudah. Perlu dibuat suatu skenario besar dan cermat yang merupakan suatu kemestian bagi keberhasilan proyek cultural ini dalam rangka mewujudkan visi masyarakat informasi Indonesia tahun 2020. Baik

aparatus pemerintah maupun anggota masyarakat harus mempersiapkan diri dalam memasuki era baru ini. Pegawai pemerintah harus mengubah kultur mereka dari sikap mental tradisional yang birokratis menjadi sikap mental yang mengutamakan kepuasan publik. Di sisi lain, anggota masyarakatpun harus mengubah sikap mereka menjadi sikap mental sebagai anggota masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan. Jika pemerintah dan masyarakat telah membuat persiapan yang matang di dalam memasuki era informasi ini, tak diragukan lagi, Indonesia, akan siap untuk berkompetisi tidak hanya secara regional, tetapi juga secara internasional. Persiapan kultural harus mendapat perhatian penuh di samping penyediaan akses. Warren dan Weschler (1999, p.130) berpendapat bahwa “*The key issues of electronic governance are not technology or internet issues per se, but societal issues exacerbated by technology. With information access traveling at light speed, the network is (virtual) society and societal change is breathtakingly fast.*”

Daftar Pustaka

- Abit, Lais, dkk. 1998, Wartawan *Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta
- APJII Statistics, 2003, ‘APJII Statistics Updated March 2003’, viewed 5 May 2004, <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=eng>
- APT HRD Section, 2003, ‘ICT Project Proposals of Indonesia’, viewed 4 May 2004, http://www.aptsec.org/aais/Projects/NEW_AIS_Projects_Indonesia1.htm
- Baswir, Revrisond 1999, ‘Menelusuri Megakorupsi,’ viewed 7/03/2005, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/12/26/0034.html>
- Charbaji, Abdulrazzak and Mikdashi, Tarik 2003, ‘A Path Analytic Study of The Attitude Toward e-government in Lebanon’ *Corporate Governance*, 2003, Vol.3, Iss.3, Proquest document ID: 331620631, viewed 28 April 2004.

- 'E-Government to be launched to promote good governance' 2003, The Jakarta Post online, 15 January 2003, viewed 28 April 2004, <http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20030115.B01>
- E-gov Index 2003, 'E-Gov Index 2003', viewed 20 May 2004, <http://www.unpan.org/e-government/global%20leaders%20tables.html>
- Freedom House Report, 2003, Singapore, viewed, 28/02/2005, <http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2004/countryratings/singapore.htm>
- Goechi.com 2001, 'e-Government Indonesia', viewed 20 May 2005, <http://www.goechi.com/egovernment.html>
- Hanazaki, Yasuo 1998, *Pers Terjebak*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
- Haryono, Tisyo and Widiwardono, Y. Kristianto, 2004, 'Current Status and Issues of E-Government in Indonesia', viewed 28 April 2004, <http://aseansec.org/13802.htm>
- Hill, David T 1994, *The Press in New Order Indonesia*, University of Western Australia Press, Perth.
- IfG.CC The Institute for eGovernment, 2004, 'Indonesia cannot meet Internet target', viewed 4 May 2004, <http://www.e-lo-go.de/html/modules.php?name=News&file=article&sid=4900>
- Information Technology Research, Innovation, and E-Government*, 2002, National Research Council, Washington D.C.
- Kunio, Yoshihara. 1990, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta.
- Lim, Merlyna, 2002, 'Cyber-civic space in Indonesia: From panopticon to pandemonium?', viewed 7/03/2005, http://www.sscr.org/programs/itic/publications/civsocandgov/merlyna_lim1.pdf
- Ling, Chu Yee and Wong Man Yee, 2000, 'Asia Media Project –Singapore,' Journalism and Media Studies Centre, The University of Hong Kong, viewed 28/02/2005, <http://jmcs.hku/students/jmcsjournals/critical/elaindmargaret.htm>
- Naomi, Omi Intan 1996, *Anjing Penjaga: Pers di Rumah Orde Baru*, Gorong-Gorong Budaya, Depok.
- Nasution, Anwar, 2000, 'Economic Crisis in Indonesia,' viewed 28/02/2005, <http://www.nber.org/~confer/2000/currency/nasution.pdf>
- O'Looney, John 2002, *Wiring Government: Challenges and Possibilities for Public Managers*. Quorum Books, Westport,CT.
- Prattipati, Satya N. 2003, 'Adoption of e_Government: Differences Between Countries in The Uses of Online Government Services' *Journal of American Academy of Business*, September 2003, Vol.3, Iss.1/2, Proquest document ID: 372797071, viewed 28 April 2004.
- Roach, Ronald 2003, 'Most Government Websites Too Advances, Survey Says', *Black Issues in Higher Education*, 9 October 2003, Vol.20, Iss.17, Proquest document ID: 07420277, viewed 28 April 2004.
- Schwartz, Rob, 2002, 'PREM Seminar E-Government: From Vision to Implementation', viewed 20 May 2004, <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/lweek/Schwartz.pdf>
- Sherlock, Stephen 1998, 'Crisis in Indonesia: Economy, Society and Culture,' Foreign Affairs, Defence and Trade Group, viewed 28/02/2005, <http://www.apf.gov.au/library/pubs/cib/1997-98/98cib13.htm>
- Sirait, Hendrik Dikson 1999, *Melawan Tirani Orde Baru: Jejak Langkah Aliansi Jurnalis Independen*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta.
- Susatijo, Dinoor 2003, 'Progress Report of Integrated e-Government in Indonesia', viewed 4 May 2004, <http://www.apectelwg.org/apecdata/telwg/28tel/bfsg/telwg28-BFSG-20htm>
- Warren, Michael A., Weschler, Louis F., 1999, 'Electronic Governance on the Internet', in G. David Garson (ed), *Information Technology and Computer Applications in Public Administration: Issues and Trends*, Idea Group Publishing, Hershey, PA.

West, Darrel M. 2004, 'E-Government and Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes' *Public Administration Review*, Jan/ Feb 2004 Vol.64, Iss.1, Proquest document ID:525732041, viewed 4 May 2004.
